



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017, mengenai penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017 diatur dengan Peraturan Gubernur Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
12. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun
Anggaran 2017 sebagai berikut:

a. Pendapatan Aceh			
1.	Pendapatan Asli Aceh	Rp.	2.227.055.653.755,-
2.	Dana Perimbangan	Rp.	3.741.189.009.600,-
3.	Lain-lain Pendapatan	Rp.	8.323.694.652.508,-
Aceh yang Sah			
	Jumlah Pendapatan	Rp.	14.291.939.315.863,-
b. Belanja Aceh			
1. Belanja Tidak Langsung			
a).	Belanja pegawai	Rp.	2.377.917.450.508,-
b).	Belanja bunga	Rp.	0,-
c).	Belanja subsidi	Rp.	0,-
d).	Belanja hibah	Rp.	677.188.600.000,-
e).	Belanja bantuan sosial	Rp.	206.251.075.000,-
f).	Belanja bagi hasil	Rp.	570.627.504.322,-
g).	Belanja bantuan keuangan	Rp.	3.410.680.148.152,-
h).	Belanja tidak terduga	Rp.	30.000.000.000,-
		Rp.	7.272.664.777.982,-
2. Belanja Langsung			
a).	Belanja pegawai	Rp.	537.012.020.368,-
b).	Belanja barang dan jasa	Rp.	4.394.818.071.880,-
c).	Belanja modal	Rp.	2.529.205.111.425,-
		Rp.	7.461.035.203.673,-
	Jumlah Belanja	Rp.	14.733.699.981.655,-
	Surplus/(Defisit)	Rp.	(441.760.665.792)
c. Pembiayaan Aceh :			
1.	Penerimaan Pembiayaan Aceh	Rp.	441.760.665.792,-
2.	Pengeluaran Pembiayaan Aceh	Rp.	0,-
	Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	441.760.665.792,-
	Sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp.	0,-
	tahun berkenaan		

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBA sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penjabaran APBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci
lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4...

Pasal 4

Penjabaran APBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b angka 1 huruf a) dan huruf b), yaitu Belanja hibah dan Belanja bantuan sosial dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBA yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

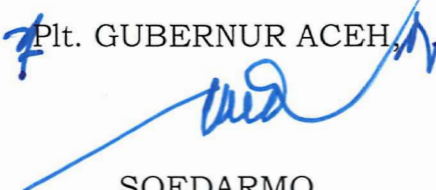
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

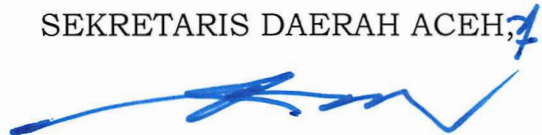
Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 9 Februari 2017 M
12 Jumadil Awal 1438 H

Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 9 Februari 2017 M
12 Jumadil Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

PEMERINTAH ACEH
RINGKASAN APBA
TAHUN ANGGARAN 2017

Halaman :1

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	PENDAPATAN	14.291.939.315.863,00
1.1.	PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA)	2.227.055.653.755,00
1.1.1.	PENDAPATAN PAJAK ACEH	1.299.742.665.000,00
1.1.1.01.	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	335.000.000.000,00
1.1.1.01.01.	PKB - MOBIL PENUMPANG - SEDAN	9.066.670.846,00
1.1.1.01.02.	PKB - MOBIL PENUMPANG - JEEP	17.425.949.427,00
1.1.1.01.03.	PKB - MOBIL PENUMPANG - MINIBUS	97.330.011.265,00
1.1.1.01.04.	PKB - MOBIL BUS - MICROBUS	984.664.264,00
1.1.1.01.05.	PKB - MOBIL BUS - BUS	859.284.261,00
1.1.1.01.06.	PKB - MOBIL BARANG/ BEBAN - PICK UP	31.364.599.046,00
1.1.1.01.07.	PKB - MOBIL BARANG/ BEBAN - LIGHT TRUCK	17.498.723.658,00
1.1.1.01.08.	PKB - MOBIL BARANG/ BEBAN - TRUCK	12.679.040.069,00
1.1.1.01.09.	PKB - SEPEDA MOTOR - SEPEDA MOTOR RODA 2	105.618.122.291,00
1.1.1.01.10.	PKB - SEPEDA MOTOR - SEPEDA MOTOR RODA 3	94.528.473,00
1.1.1.01.12.	PKB - SEPEDA MOTOR BECAK	74.733.499,00
1.1.1.01.13.	PKB - ALAT-ALAT BERAT DAN BESAR	108.751.117,00
1.1.1.01.14.	PKB - KENDARAAN KHUSUS	41.894.921.784,00
1.1.1.02.	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	385.000.000.000,00
1.1.1.02.01.	BBNKB -MOBIL PENUMPANG - SEDAN	2.009.767.162,00
1.1.1.02.02.	BBNKB -MOBIL PENUMPANG - JEEP	14.644.368.363,00
1.1.1.02.03.	BBNKB -MOBIL PENUMPANG - MINIBUS	108.127.505.461,00
1.1.1.02.04.	BBNKB -MOBIL BUS - MICROBUS	4.113.956.559,00
1.1.1.02.05.	BBNKB -MOBIL BUS - BUS	2.513.069.104,00
1.1.1.02.06.	BBNKB -MOBIL BARANG/ BEBAN - PICK UP	39.173.485.981,00
1.1.1.02.07.	BBNKB -MOBIL BARANG/ BEBAN - LIGHT TRUCK	21.609.195.879,00
1.1.1.02.08.	BBNKB -MOBIL BARANG/ BEBAN - TRUCK	9.530.942.151,00
1.1.1.02.09.	BBNKB -SEPEDA MOTOR - SEPEDA MOTOR RODA 2	179.159.175.529,00
1.1.1.02.10.	BBNKB -SEPEDA MOTOR - SEPEDA MOTOR RODA 3	312.294.187,00
1.1.1.02.12.	BBNKB - SEPEDA MOTOR BECAK	83.130.444,00
1.1.1.02.13.	BBNKB - ALAT-ALAT BERAT DAN BESAR	392.431.870,00
1.1.1.02.14.	BBNKB - KENDARAAN KHUSUS	3.330.677.310,00
1.1.1.03.	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR	287.346.850.000,00
1.1.1.03.01.	PAJAK BAHAN BAKAR PREMIUM	147.604.365.259,00
1.1.1.03.02.	PAJAK BAHAN BAKAR PERTAMAX	12.155.130.420,00
1.1.1.03.03.	PAJAK BAHAN BAKAR PERTAMAX PLUS	312.156.520,00
1.1.1.03.04.	PAJAK BAHAN BAKAR SOLAR	10.569.321.048,00
1.1.1.03.06.	PAJAK BAHAN BAKAR BIO SOLAR	78.085.267.758,00
1.1.1.03.07.	PAJAK BAHAN BAKAR PERTAMINA DEX	425.487.233,00
1.1.1.03.08.	PAJAK BAHAN BAKAR PERTAMAX RACING	5.001.250,00
1.1.1.03.09.	PAJAK BAHAN BAKAR PERTALITE	24.804.963.034,00
1.1.1.03.10.	PAJAK BAHAN BAKAR DEXLITE	10.099.169.183,00
1.1.1.03.11.	PAJAK BAHAN BAKAR PERTAMAX TURBO	3.285.988.295,00
1.1.1.04.	PAJAK AIR PERMUKAAN	1.000.000.000,00
1.1.1.04.01.	PAJAK AIR PERMUKAAN.	1.000.000.000,00
1.1.1.05.	PAJAK ROKOK	291.395.815.000,00
1.1.1.05.01.	PAJAK ROKOK	291.395.815.000,00
1.1.2.	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH	10.068.000.000,00
1.1.2.15.	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	5.038.143.000,00
1.1.2.15.01.	PENYEWAAN TANAH DAN BANGUNAN	514.217.000,00
1.1.2.15.02.	LABORATORIUM	1.557.070.000,00
1.1.2.15.03.	RUANGAN	121.000.000,00
1.1.2.15.04.	KENDARAAN BERMOTOR	2.845.856.000,00
1.1.2.17.	RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN	2.132.500.000,00
1.1.2.17.01.	PELELANGAN IKAN	48.000.000,00
1.1.2.17.03.	PELELANGAN HASIL BUMI	2.084.500.000,00
1.1.2.20.	RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGRAHAN/ VILLA	686.250.000,00
1.1.2.20.01.	PELAYANAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA	686.250.000,00
1.1.2.22.	RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN	115.433.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.1.2.22.01.	PELAYANAN JASA KE PELABUHAN	115.433.000,00
1.1.2.23.	RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA	1.080.000.000,00
1.1.2.23.02.	PELAYANAN TEMPAT PARIWISATA	80.000.000,00
1.1.2.23.03.	PELAYANAN TEMPAT OLAHRAGA	1.000.000.000,00
1.1.2.25.	RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH	527.174.000,00
1.1.2.25.01.	PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA DAERAH	527.174.000,00
1.1.2.29.	RETRIBUSI IZIN TRAYEK	38.500.000,00
1.1.2.29.02.	PEMBERIAN IZIN TRAYEK KEPADA BADAN	38.500.000,00
1.1.2.30.	RETRIBUSI IZIN PERIKANAN	250.000.000,00
1.1.2.30.01.	PEMBERIAN IZIN USAHA PERIKANAN KEPADA ORANG PRIBADI	246.500.000,00
1.1.2.30.02.	PEMBERIAN IZIN USAHA PERIKANAN KEPADA BADAN	3.500.000,00
1.1.2.32.	RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)	200.000.000,00
1.1.2.32.01.	PEMBERIAN PERPANJANGAN IMTA KEPADA PEMBERI KERJA TENAGA KERJA ASING	200.000.000,00
1.1.3.	PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	227.982.069.855,00
1.1.3.01.	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMDA (DEVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	227.982.069.855,00
1.1.3.01.01.	BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	227.982.069.855,00
1.1.4.	LAIN-LAIN PAA YANG SAH	689.262.918.900,00
1.1.4.01.	HASIL PENJUALAN ASET DAERAH YANG TIDAK DIPISAHKAN	22.000.000.000,00
1.1.4.01.01.	HASIL PENJUALAN TANAH	12.000.000.000,00
1.1.4.01.02.	HASIL PENJUALAN PERALATAN DAN MESIN	10.000.000.000,00
1.1.4.03.	PENERIMAAN JASA GIRO	8.640.000.000,00
1.1.4.03.01.	JASA GIRO KAS DAERAH	8.640.000.000,00
1.1.4.04.	PENDAPATAN BUNGA	64.293.579.800,00
1.1.4.04.01.	PENDAPATAN BUNGA DEPOSITO KAS DAERAH	64.293.579.800,00
1.1.4.07.	PENDAPATAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN	9.500.000.000,00
1.1.4.07.01.	BIDANG PENDIDIKAN	1.500.000.000,00
1.1.4.07.02.	BIDANG KESEHATAN	1.000.000.000,00
1.1.4.07.03.	BIDANG PEKERJAAN UMUM	7.000.000.000,00
1.1.4.08.	PENDAPATAN DENDA PAJAK	27.575.000.000,00
1.1.4.08.01.	PENDAPATAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	27.575.000.000,00
1.1.4.15.	PENDAPATAN DARI ANGSURAN/CICILAN PENJUALAN	165.487.000,00
1.1.4.15.01.	ANGSURAN/CICILAN PENJUALAN RUMAH DINAS DAERAH GOLONGAN III	165.487.000,00
1.1.4.16.	HASIL DARI PEMANFAATAN KEKAYAAN DAERAH	18.520.125.000,00
1.1.4.16.01.	HASIL DARI PEMANFAATAN KEKAYAAN DAERAH SEWA	1.604.200.000,00
1.1.4.16.02.	HASIL DARI PEMANFAATAN KEKAYAAN DAERAH KERJASAMA PEMANFAATAN	16.915.925.000,00
1.1.4.17.	PENDAPATAN ZAKAT*	35.864.400.000,00
1.1.4.17.01.	PENDAPATAN ZAKAT.*	35.864.400.000,00
1.1.4.18.	PENDAPATAN BLUD	502.704.327.100,00
1.1.4.18.01.	PENDAPATAN JASA LAYANAN UMUM BLUD	502.704.327.100,00
1.2.	DANA PERIMBANGAN	3.741.189.009.600,00
1.2.1.	DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	250.200.545.600,00
1.2.1.01.	BAGI HASIL PAJAK	238.713.450.600,00
1.2.1.01.01.	BAGI HASIL DARI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN	76.985.423.000,00
1.2.1.01.02.	BAGI HASIL DARI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN	7.089.231.000,00
1.2.1.01.03.	BAGI HASIL DARI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR KEHUTANAN	92.894.000,00
1.2.1.01.04.	BAGI HASIL DARI PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI	148.568.438.000,00
1.2.1.01.05.	BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU	5.977.464.600,00
1.2.1.02.	BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SUMBER DAYA ALAM	11.487.095.000,00
1.2.1.02.02.	BAGI HASIL DARI PROVISI SUMBER DAYA HUTAN	56.608.000,00
1.2.1.02.03.	BAGI HASIL DARI DANA REBOISASI	380.088.000,00
1.2.1.02.04.	BAGI HASIL DARI IURAN TETAP (LAND-RENT)	1.825.253.000,00
1.2.1.02.05.	BAGI HASIL DARI IURAN EKSPLORASI DAN IURAN EKSPLOITASI (ROYALTY)	1.467.674.000,00
1.2.1.02.08.	BAGI HASIL DARI PERTAMBANGAN MINYAK BUMI	3.995.409.000,00
1.2.1.02.09.	BAGI HASIL DARI PERTAMBANGAN GAS BUMI	3.502.813.000,00
1.2.1.02.10.	BAGI HASIL DARI PERTAMBANGAN PANAS BUMI	259.250.000,00
1.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	1.930.152.204.000,00
1.2.2.01.	DANA ALOKASI UMUM (DAU).	1.930.152.204.000,00
1.2.2.01.01.	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.930.152.204.000,00
1.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	1.560.836.260.000,00
1.2.3.01.	DANA ALOKASI KHUSUS REGULER	290.257.000.000,00
1.2.3.01.01.	DAK BIDANG INFRASTRUKTUR JALAN	38.060.000.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.2.3.01.02.	DAK BIDANG INFRASTRUKTUR IRIGASI	8.823.000.000,00
1.2.3.01.08.	DAK BIDANG KESEHATAN	70.643.000.000,00
1.2.3.01.09.	DAK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	11.300.000.000,00
1.2.3.01.15.	DAK BIDANG PERTANIAN	12.267.000.000,00
1.2.3.01.18.	DAK BIDANG PENDIDIKAN	125.236.000.000,00
1.2.3.01.21.	DAK BIDANG PARIWISATA	2.500.000.000,00
1.2.3.01.22.	DAK BIDANG ENERGI SKALA KECIL DAN MENENGAH	21.428.000.000,00
1.2.3.02.	DAK NON FISIK	1.270.579.260.000,00
1.2.3.02.01.	BOS SATUAN PENDIDIKAN PROVINSI	884.427.600.000,00
1.2.3.02.02.	TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD	357.618.291.000,00
1.2.3.02.03.	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU PNSD	13.530.000.000,00
1.2.3.02.04.	TUNJANGAN KHUSUS GURU	8.348.266.000,00
1.2.3.02.12.	PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	4.500.000.000,00
1.2.3.02.14.	PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.155.103.000,00
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.323.694.652.508,00
1.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	20.072.860.947,00
1.3.1.01.	PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH	18.468.940.947,00
1.3.1.01.01.	PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT	18.468.940.947,00
1.3.1.03.	PENDAPATAN HIBAH DARI BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI SWASTA DALAM NEGERI	1.603.920.000,00
1.3.1.03.01.	PENDAPATAN HIBAH DARI BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI SWASTA DALAM NEGERI	1.603.920.000,00
1.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	8.303.621.791.561,00
1.3.4.01.	DANA PENYESUAIAN	281.026.174.561,00
1.3.4.01.06.	DANA TAMBAHAN DBH-MINYAK DAN GAS BUMI	281.026.174.561,00
1.3.4.02.	DANA OTONOMI KHUSUS	8.022.595.617.000,00
1.3.4.02.01.	DANA OTONOMI KHUSUS.	8.022.595.617.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	14.291.939.315.863,00
2.	BELANJA	14.733.699.981.655,00
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.272.664.777.982,00
2.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.377.917.450.508,00
2.1.1.01.	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN	1.851.458.952.617,00
2.1.1.01.01.	GAJI POKOK PNS/ UANG REPRESENTASI	1.123.653.410.614,00
2.1.1.01.02.	TUNJANGAN KELUARGA	116.153.699.084,00
2.1.1.01.03.	TUNJANGAN JABATAN	18.738.889.749,00
2.1.1.01.04.	TUNJANGAN FUNGSIONAL	73.663.504.772,00
2.1.1.01.05.	TUNJANGAN FUNGSIONAL UMUM	21.939.184.189,00
2.1.1.01.06.	TUNJANGAN BERAS	64.240.473.371,00
2.1.1.01.07.	TUNJANGAN PPH/TUNJANGAN KHUSUS	9.474.795.884,00
2.1.1.01.08.	PEMBULATAN GAJI	579.666.539,00
2.1.1.01.10.	UANG PAKET	220.140.000,00
2.1.1.01.11.	TUNJANGAN BADAN MUSYAWARAH	70.209.000,00
2.1.1.01.12.	TUNJANGAN KOMISI	147.987.000,00
2.1.1.01.13.	TUNJANGAN BADAN ANGGARAN	92.133.000,00
2.1.1.01.14.	TUNJANGAN BADAN KEHORMATAN	16.443.000,00
2.1.1.01.15.	TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN	33.669.000,00
2.1.1.01.16.	TUNJANGAN PERUMAHAN	1.296.000.000,00
2.1.1.01.18.	UANG JASA PENGABDIAN	220.800.000,00
2.1.1.01.19.	BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD	561.600.000,00
2.1.1.01.21.	TUNJANGAN IURAN JKK KDH	190.000,00
2.1.1.01.22.	TUNJANGAN IURAN JKM KDH	235.000,00
2.1.1.01.23.	TUNJANGAN IURAN JKK DPRA	5.283.360,00
2.1.1.01.24.	TUNJANGAN IURAN JKM DPRA	6.604.200,00
2.1.1.01.25.	TUNJANGAN IURAN JKK PNS	2.414.986.725,00
2.1.1.01.26.	TUNJANGAN IURAN JKM PNS	2.996.038.712,00
2.1.1.01.29.	TUNJANGAN IURAN BPJS KESEHATAN KDH/WKDH	3.000.000,00
2.1.1.01.30.	TUNJANGAN IURAN BPJS KESEHATAN DPRA	233.280.000,00
2.1.1.01.31.	TUNJANGAN IURAN BPJS KESEHATAN PNS	34.904.972.418,00
2.1.1.01.34.	TUNJANGAN IURAN BPJS KESEHATAN NON PNS	295.200.000,00
2.1.1.01.35.	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU SERTIFIKASI	362.981.557.000,00
2.1.1.01.36.	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU NON SERTIFIKASI	16.515.000.000,00
2.1.1.02.	BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	481.475.594.741,00
2.1.1.02.01.	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA	38.052.448.900,00
2.1.1.02.04.	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	121.200.000,00
2.1.1.02.05.	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA	323.730.746.591,00
2.1.1.02.06.	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	119.571.199.250,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.1.1.03.	BELANJA PENERIMAAN LAINNYA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA KDH/WKDH	12.035.976.000,00
2.1.1.03.01.	TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	8.748.000.000,00
2.1.1.03.02.	BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KDH/WKDH	3.287.976.000,00
2.1.1.05.	INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH	32.836.527.150,00
2.1.1.05.01.	INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH - PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	10.050.000.000,00
2.1.1.05.02.	INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH - BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	11.550.000.000,00
2.1.1.05.03.	INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH - PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR	8.620.405.500,00
2.1.1.05.04.	INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH - PAJAK AIR PERMUKAAN	30.000.000,00
2.1.1.05.05.	INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH - PAJAK ROKOK	2.586.121.650,00
2.1.1.06.	INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH	110.400.000,00
2.1.1.06.01.	INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH - PELAYANAN KESEHATAN	36.600.000,00
2.1.1.06.15.	INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH - PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	33.000.000,00
2.1.1.06.25.	INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH - PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH	36.000.000,00
2.1.1.06.32.	INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH - PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)	4.800.000,00
2.1.4.	BELANJA HIBAH	677.188.600.000,00
2.1.4.05.	BELANJA HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN	31.500.000.000,00
2.1.4.05.01.	BELANJA HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN....	31.500.000.000,00
2.1.4.06.	BELANJA HIBAH DANA BOS KEPADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR KAB/KOTA	603.764.800.000,00
2.1.4.06.01.	SATUAN PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN/KOTA	603.764.800.000,00
2.1.4.07.	BELANJA HIBAH BOS KEPADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH KAB/KOTA	41.923.800.000,00
2.1.4.07.01.	SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN/KOTA	41.923.800.000,00
2.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	206.251.075.000,00
2.1.5.03.	BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA ANGGOTA MASYARAKAT	206.251.075.000,00
2.1.5.03.01.	BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA ANGGOTA MASYARAKAT	206.251.075.000,00
2.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	570.627.504.322,00
2.1.6.02.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KABUPATEN/KOTA	570.627.504.322,00
2.1.6.02.01.	BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KABUPATEN/KOTA	570.627.504.322,00
2.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	3.410.680.148.152,00
2.1.7.02.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA	3.408.914.155.252,00
2.1.7.02.01.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA....	3.388.914.155.252,00
2.1.7.02.02.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA KABUPATEN/KOTA	20.000.000.000,00
2.1.7.04.	BELANJA BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK	1.765.992.900,00
2.1.7.04.01.	BELANJA BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK	1.765.992.900,00
2.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.000.000.000,00
2.1.8.01.	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.000.000.000,00
2.1.8.01.01.	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.000.000.000,00
2.2.	BELANJA LANGSUNG	7.461.035.203.673,00
2.2.1.	BELANJA PEGAWAI	537.012.020.368,00
2.2.1.01.	HONORARIUM PNS	87.607.946.000,00
2.2.1.01.01.	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN	27.692.186.000,00
2.2.1.01.02.	HONORARIUM TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA	6.554.650.000,00
2.2.1.01.03.	HONORARIUM TIM PEMERIKSA BARANG DAN JASA	2.539.100.000,00
2.2.1.01.04.	HONORARIUM PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	10.468.800.000,00
2.2.1.01.05.	HONORARIUM INSTRUKTUR	1.140.000.000,00
2.2.1.01.06.	HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN	38.815.410.000,00
2.2.1.01.08.	HONORARIUM PERSIPAN PENGADAAN TANAH	397.800.000,00
2.2.1.02.	HONORARIUM NON PNS	403.596.337.500,00
2.2.1.02.01.	HONORARIUM INSTRUKTUR	783.315.000,00
2.2.1.02.02.	HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP	363.864.100.000,00
2.2.1.02.03.	HONORARIUM TENAGA TUKANG/TEKNISI/OPERATOR/ASISTEN	20.728.062.500,00
2.2.1.02.04.	HONORARIUM PENELITI	244.000.000,00
2.2.1.02.05.	HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN	17.976.860.000,00
2.2.1.03.	UANG LEMBUR	10.650.021.068,00
2.2.1.03.01.	UANG LEMBUR PNS	10.650.021.068,00
2.2.1.99.	BELANJA PEGAWAI BLUD	35.157.715.800,00
2.2.1.99.01.	BELANJA PEGAWAI BLUD.	35.157.715.800,00
2.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	4.394.818.071.880,00
2.2.2.01.	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS	42.396.479.264,00
2.2.2.01.01.	BELANJA ALAT TULIS KANTOR	20.250.192.766,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.2.2.01.02.	BELANJA DOKUMEN/ADMINISTRASI TENDER	24.675.000,00
2.2.2.01.03.	BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK (LAMPU PIJAR, BATTERY KERING)	6.448.094.947,00
2.2.2.01.04.	BELANJA PERANGKO, MATERAI DAN BENDA POS LAINNYA	967.539.932,00
2.2.2.01.05.	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH	4.843.947.519,00
2.2.2.01.06.	BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK/GAS	6.425.827.600,00
2.2.2.01.07.	BELANJA PENGISIAN TABUNG PEMADAM KEBAKARAN	496.035.000,00
2.2.2.01.08.	BELANJA PENGISIAN TABUNG GAS	938.636.500,00
2.2.2.01.09.	BELANJA PERLENGKAPAN/BAHAN KEPERLUAN PASIEN	2.001.530.000,00
2.2.2.02.	BELANJA BAHAN/MATERIAL	339.467.946.221,00
2.2.2.02.01.	BELANJA BAHAN BAKU BANGUNAN	4.883.300.000,00
2.2.2.02.02.	BELANJA BAHAN/BIBIT TANAMAN	63.022.379.141,00
2.2.2.02.03.	BELANJA BIBIT TERNAK	13.514.950.000,00
2.2.2.02.04.	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN	36.957.110.304,00
2.2.2.02.05.	BELANJA BAHAN KIMIA	4.620.753.000,00
2.2.2.02.06.	BELANJA PERSEDIAAN MAKANAN POKOK	2.021.600.000,00
2.2.2.02.07.	BELANJA TAS KEGIATAN/PERLENGKAPAN PERSERTA	12.582.322.992,00
2.2.2.02.08.	BELANJA BAHAN LOGISTIK RUMAH TANGGA	14.957.888.000,00
2.2.2.02.09.	BELANJA CINDERAMATA	4.926.655.000,00
2.2.2.02.10.	BELANJA DEKORASI	7.582.574.913,00
2.2.2.02.11.	BELANJA DOKUMENTASI	4.378.356.670,00
2.2.2.02.12.	BELANJA BAHAN ARSIP	234.430.000,00
2.2.2.02.13.	BELANJA PERLENGKAPAN OLAH RAGA	5.815.285.000,00
2.2.2.02.14.	BELANJA BAHAN SPECIMEN	33.800.000,00
2.2.2.02.16.	BELANJA BAHAN PAKAN TERNAK	13.301.282.500,00
2.2.2.02.18.	BELANJA BAHAN PUBLIKASI	9.005.801.329,00
2.2.2.02.19.	BELANJA BAHAN ALAT-ALAT KESEHATAN	2.804.420.000,00
2.2.2.02.20.	BELANJA BAHAN PERCONTOHAN	15.247.977.553,00
2.2.2.02.21.	BELANJA BAHAN PANGAN	23.569.104.500,00
2.2.2.02.22.	BELANJA BAHAN KELENGKAPAN LAPANGAN	97.541.445.719,00
2.2.2.02.23.	BELANJA BAHAN KELENGKAPAN SARANA PERIBADATAN	828.966.500,00
2.2.2.02.24.	BELANJA BAHAN KLINIK	185.715.000,00
2.2.2.02.25.	BELANJA BAHAN LABORATORIUM	1.451.828.100,00
2.2.2.03.	BELANJA JASA KANTOR	358.224.976.535,00
2.2.2.03.01.	BELANJA TELEPON	6.186.244.000,00
2.2.2.03.02.	BELANJA AIR	7.202.888.943,00
2.2.2.03.03.	BELANJA LISTRIK	52.168.294.546,00
2.2.2.03.04.	BELANJA JASA PENGUMUMAN	365.006.000,00
2.2.2.03.05.	BELANJA SURAT KABAR/MAJALAH	1.945.056.600,00
2.2.2.03.06.	BELANJA KAWAT/FAKSIMILI/INTERNET	10.700.712.491,00
2.2.2.03.07.	BELANJA PAKET/PENGIRIMAN	7.666.088.737,00
2.2.2.03.08.	BELANJA SERTIFIKASI	6.329.955.000,00
2.2.2.03.09.	BELANJA JASA CEK/BILYET/GIRO	79.015.000,00
2.2.2.03.12.	BELANJA JASA PUBLIKASI	39.142.788.913,00
2.2.2.03.13.	BELANJA JASA SERVICE PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	17.896.247.143,00
2.2.2.03.14.	BELANJA JASA TRANSPORT DAN UANG SAKU PESERTA	116.766.416.000,00
2.2.2.03.15.	BELANJA JASA OTOPSI DAN PENGURUSAN MAYAT TERLANTAR	683.700.000,00
2.2.2.03.16.	BELANJA JASA CLEANNING SERVICE	31.503.696.242,00
2.2.2.03.17.	BELANJA JASA OPERASI DAN PEMELIHARAAN KONSTRUKSI JARINGAN AIR	11.491.996.000,00
2.2.2.03.18.	BELANJA JASA PENGOLAHAN LAHAN DAN TANAMAN	23.416.402.000,00
2.2.2.03.19.	BELANJA JASA OPERASI DAN PEMELIHARAAN KONSTRUKSI JARINGAN JALAN	110.000.000,00
2.2.2.03.20.	BELANJA JASA ADMINISTRASI/PENDAFTARAN/IURAN	4.438.416.920,00
2.2.2.03.21.	BELANJA JASA PENYELENGGARA ACARA (EO)	20.132.052.000,00
2.2.2.04.	BELANJA PREMI ASURANSI	573.235.184.400,00
2.2.2.04.01.	BELANJA PREMI ASURANSI KESEHATAN	572.010.734.400,00
2.2.2.04.02.	BELANJA PREMI ASURANSI BARANG MILIK DAERAH	1.224.450.000,00
2.2.2.05.	BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	51.542.239.621,00
2.2.2.05.01.	BELANJA JASA SERVICE	15.103.355.200,00
2.2.2.05.02.	BELANJA PENGGANTIAN SUKU CADANG	10.820.697.000,00
2.2.2.05.03.	BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK/GAS DAN PELUMAS	20.640.139.108,00
2.2.2.05.04.	BELANJA JASA KIR	420.145.000,00
2.2.2.05.05.	BELANJA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	3.800.075.188,00
2.2.2.05.06.	BELANJA BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	757.828.125,00
2.2.2.06.	BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN	38.300.011.321,00
2.2.2.06.01.	BELANJA CETAK	28.431.510.473,00
2.2.2.06.02.	BELANJA PENGGANDAAN	9.692.677.348,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.2.2.06.03.	BELANJA PENJILIDAN	175.823.500,00
2.2.2.07.	BELANJA SEWA RUMAH/GEDUNG/GUDANG/PARKIR	114.230.578.500,00
2.2.2.07.02.	BELANJA SEWA GEDUNG/ KANTOR/TEMPAT	100.096.598.500,00
2.2.2.07.03.	BELANJA SEWA RUANG RAPAT/PERTEMUAN	13.906.200.000,00
2.2.2.07.04.	BELANJA SEWA TEMPAT PARKIR/UANG TAMBAT/HANGGAR SARANA MOBILITAS	227.780.000,00
2.2.2.08.	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS	14.123.145.000,00
2.2.2.08.01.	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS DARAT	9.449.845.000,00
2.2.2.08.02.	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS AIR	241.000.000,00
2.2.2.08.03.	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS UDARA	4.432.300.000,00
2.2.2.10.	BELANJA SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR	9.019.005.000,00
2.2.2.10.01.	BELANJA SEWA MEJA KURSI	830.000.000,00
2.2.2.10.04.	BELANJA SEWA GENERATOR	263.000.000,00
2.2.2.10.05.	BELANJA SEWA TENDA	3.606.825.000,00
2.2.2.10.06.	BELANJA SEWA PAKAIAN ADAT/TRADISIONAL	759.400.000,00
2.2.2.10.07.	BELANJA SEWA SOUND SYSTEM DAN ALAT ELEKTRONIK	3.559.780.000,00
2.2.2.11.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN	113.911.158.193,00
2.2.2.11.01.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN PEGAWAI	738.195.000,00
2.2.2.11.02.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT	16.424.622.889,00
2.2.2.11.03.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN TAMU	10.795.926.004,00
2.2.2.11.04.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PELATIHAN/KEGIATAN	72.383.210.500,00
2.2.2.11.05.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN PASIEN	11.094.350.300,00
2.2.2.11.06.	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KLIEN	2.474.853.500,00
2.2.2.12.	BELANJA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA	3.038.884.996,00
2.2.2.12.01.	BELANJA PAKAIAN DINAS KDH DAN WKDH	420.000.000,00
2.2.2.12.02.	BELANJA PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)	1.171.900.000,00
2.2.2.12.03.	BELANJA PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)	172.290.000,00
2.2.2.12.04.	BELANJA PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)	1.006.569.996,00
2.2.2.12.05.	BELANJA PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)	232.500.000,00
2.2.2.12.06.	BELANJA ATRIBUT KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS	35.625.000,00
2.2.2.13.	BELANJA PAKAIAN KERJA	3.220.712.500,00
2.2.2.13.01.	BELANJA PAKAIAN KERJA LAPANGAN	3.037.770.000,00
2.2.2.13.02.	BELANJA ATRIBUT KELENGKAPAN PAKAIAN KERJA	182.942.500,00
2.2.2.14.	BELANJA PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU	3.039.310.000,00
2.2.2.14.02.	BELANJA PAKAIAN ADAT DAERAH	472.250.000,00
2.2.2.14.03.	BELANJA PAKAIAN BATIK TRADISIONAL	643.300.000,00
2.2.2.14.04.	BELANJA PAKAIAN OLAHRAGA	1.357.435.000,00
2.2.2.14.05.	BELANJA ATRIBUT KELENGKAPAN PAKAIAN KHUSUS	566.325.000,00
2.2.2.15.	BELANJA PERJALANAN DINAS	330.564.142.304,00
2.2.2.15.01.	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH	190.438.394.500,00
2.2.2.15.02.	BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH	123.364.820.804,00
2.2.2.15.03.	BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI	16.760.927.000,00
2.2.2.18.	BELANJA PEMELIHARAAN	43.596.515.634,00
2.2.2.18.01.	BELANJA PEMELIHARAAN TANAH	660.000.000,00
2.2.2.18.02.	BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN	9.777.738.398,00
2.2.2.18.03.	BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN	20.243.763.761,00
2.2.2.18.04.	BELANJA PEMELIHARAAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	12.075.000.000,00
2.2.2.18.05.	BELANJA PEMELIHARAAN ASET TETAP	393.128.000,00
2.2.2.18.06.	BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	446.885.475,00
2.2.2.19.	BELANJA JASA KONSULTANSI	92.167.328.967,00
2.2.2.19.01.	BELANJA JASA KONSULTANSI PENELITIAN	22.028.485.000,00
2.2.2.19.02.	BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN	60.724.553.261,00
2.2.2.19.03.	BELANJA JASA KONSULTANSI PENGAWASAN	9.414.290.706,00
2.2.2.20.	BELANJA BARANG DANA BOS	246.873.953.806,00
2.2.2.20.01.	BELANJA BARANG DANA BOS.	246.873.953.806,00
2.2.2.21.	BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PIHAK KETIGA	1.242.090.851.321,00
2.2.2.21.01.	BELANJA HIBAH BARANG ATAU JASA YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT	668.778.367.040,00
2.2.2.21.02.	BELANJA BANTUAN SOSIAL BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT	219.490.350.760,00
2.2.2.21.03.	BELANJA HIBAH BARANG ATAU JASA YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA KABUPATEN/KOTA YANG PENDANAANNYA BERSUMBER DARI TAMBAHAN DANA BAGI HASIL DAN OTONOMI	353.822.133.521,00
2.2.2.23.	BELANJA BEASISWA PENDIDIKAN PNS	8.800.000.000,00
2.2.2.23.03.	BELANJA BEASISWA TUGAS BELAJAR S2	3.740.000.000,00
2.2.2.23.04.	BELANJA BEASISWA TUGAS BELAJAR S3	900.000.000,00
2.2.2.23.05.	BELANJA BEASISWA IZIN BELAJAR S2	4.010.000.000,00
2.2.2.23.06.	BELANJA BEASISWA IZIN BELAJAR S3	150.000.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.2.2.24.	BELANJA KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI, BIMBINGAN TEKNIS PNS	35.230.972.996,00
2.2.2.24.01.	BELANJA KURSUS-KURSUS SINGKAT/PELATIHAN	30.920.612.996,00
2.2.2.24.02.	BELANJA SOSIALISASI	2.765.500.000,00
2.2.2.24.03.	BELANJA BIMBINGAN TEKNIS	1.544.860.000,00
2.2.2.25.	BELANJA ZAKAT YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MUSTAHIQ	35.864.400.000,00
2.2.2.25.01.	BELANJA ZAKAT UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MUSTAHIQ	35.864.400.000,00
2.2.2.27.	UANG/BARANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT (HANYA UNTUK PEMBERIAN HADIAH PENGHARGAAN SUATU PRESTASI)	40.277.705.000,00
2.2.2.27.01.	UANG DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA.	15.147.075.000,00
2.2.2.27.02.	UANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT	11.434.130.000,00
2.2.2.27.03.	BARANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA	4.418.500.000,00
2.2.2.27.04.	BARANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT	9.278.000.000,00
2.2.2.28.	BELANJA JASA NARASUMBER/TENAGA AHLI/PENELITI/ACARA	92.656.004.000,00
2.2.2.28.01.	BELANJA JASA NARASUMBER/TENAGA AHLI/PENELITI.	87.704.509.000,00
2.2.2.28.02.	BELANJA JASA PEMBAWA ACARA/PEMBACA PADA ACARA/UPACARA	4.951.495.000,00
2.2.2.29.	BELANJA JASA PELAYANAN MEDICAL CHECK UP	1.044.080.400,00
2.2.2.29.01.	BELANJA JASA PELAYANAN MEDICAL CHEK UP KDH/WKH	120.000.000,00
2.2.2.29.02.	BELANJA JASA PELAYANAN MEDICAL CHECK UP PIMPINAN/ANGGOTA DPRA	924.080.400,00
2.2.2.30.	BELANJA BEASISWA PENDIDIKAN NON APARATUR	99.022.940.100,00
2.2.2.30.01.	BELANJA BEASISWA PENDIDIKAN DIPLOMA	22.968.993.000,00
2.2.2.30.02.	BELANJA BEASISWA PENDIDIKAN S1	39.735.109.100,00
2.2.2.30.03.	BELANJA BEASISWA PENDIDIKAN S2	24.055.880.000,00
2.2.2.30.04.	BELANJA BEASISWA PENDIDIKAN S3	12.262.958.000,00
2.2.2.99.	BELANJA BARANG DAN JASA BLUD	462.879.545.801,00
2.2.2.99.01.	BELANJA BARANG DAN JASA BLUD.	462.879.545.801,00
2.2.3.	BELANJA MODAL	2.529.205.111.425,00
2.2.3.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH PERTANIAN	6.000.000.000,00
2.2.3.02.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH LADANG	6.000.000.000,00
2.2.3.07.	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH DANAU/RAWA	1.875.460.000,00
2.2.3.07.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH DANAU	1.875.460.000,00
2.2.3.11.	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG	66.571.243.000,00
2.2.3.11.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/GEDUNG TEMPAT TINGGAL	607.600.000,00
2.2.3.11.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH UNTUK BANGUNAN INDUSTRI	3.000.000.000,00
2.2.3.11.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA/JASA	60.963.643.000,00
2.2.3.11.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH KOSONG	2.000.000.000,00
2.2.3.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH UNTUK BANGUNAN BUKAN GEDUNG	23.340.840.000,00
2.2.3.13.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH LAPANGAN PENGUJIAN/PENGOLAHAN	3.000.000.000,00
2.2.3.13.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH LAPANGAN TERBANG	5.900.000.000,00
2.2.3.13.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH UNTUK BANGUNAN AIR	4.209.240.000,00
2.2.3.13.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT IBADAH	231.600.000,00
2.2.3.13.14.	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAH UNTUK RUANG TERBUKA HIJAU	10.000.000.000,00
2.2.3.14.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT BESAR DARAT	3.725.000.000,00
2.2.3.14.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN EXCAVATOR	3.200.000.000,00
2.2.3.14.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PENGANGKAT	97.000.000,00
2.2.3.14.11.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN PROSES	428.000.000,00
2.2.3.16.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT BANTU	11.270.009.725,00
2.2.3.16.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN ELECTRIC GENERATING SET	6.562.548.000,00
2.2.3.16.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN POMPA	467.461.725,00
2.2.3.16.07.	BELANJA MODAL PENGADAAN UNIT PEMELIHARAAN LAPANGAN	40.000.000,00
2.2.3.16.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PENGOLAHAN AIR KOTOR	4.200.000.000,00
2.2.3.17.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	11.765.084.000,00
2.2.3.17.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	5.767.750.000,00
2.2.3.17.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	500.000.000,00
2.2.3.17.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	1.051.000.000,00
2.2.3.17.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	3.356.334.000,00
2.2.3.17.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	675.000.000,00
2.2.3.17.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA	415.000.000,00
2.2.3.19.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT ANGKUT APUNG BERMOTOR	2.380.140.000,00
2.2.3.19.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT ANGKUT APUNG BERMOTOR PENUMPANG	2.300.140.000,00
2.2.3.19.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT ANGKUT APUNG BERMOTOR KHUSUS	80.000.000,00
2.2.3.20.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT ANGKUT APUNG TAK BERMOTOR	9.530.000.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.2.3.20.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT ANGKUT APUNG TAK BERMOTOR KHUSUS	9.530.000.000,00
2.2.3.22.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT BENGKEL BERMESIN	1.540.400.000,00
2.2.3.22.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG BERPINDAH	1.031.000.000,00
2.2.3.22.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	5.000.000,00
2.2.3.22.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERKAKAS BENGKEL SERVICE	50.600.000,00
2.2.3.22.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERKAKAS PENGANGKAT BERMESIN	248.000.000,00
2.2.3.22.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERKAKAS BENGKEL KAYU	199.800.000,00
2.2.3.22.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN LAS	6.000.000,00
2.2.3.23.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	1.906.411.000,00
2.2.3.23.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERKAKAS KHUSUS (SPECIAL TOOL)	236.411.000,00
2.2.3.23.07.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERKAKAS BENGKEL KERJA	1.480.000.000,00
2.2.3.23.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN TUKANG-TUKANG BESI	190.000.000,00
2.2.3.24.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT UKUR	4.397.927.600,00
2.2.3.24.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT UKUR/PEMBANDING	3.625.927.600,00
2.2.3.24.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT UKUR LAINNYA	772.000.000,00
2.2.3.25.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PENGOLAHAN	18.300.560.000,00
2.2.3.25.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN	8.445.000.000,00
2.2.3.25.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PANEN/PENGOLAHAN	4.200.000.000,00
2.2.3.25.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT PETERNAKAN	1.126.300.000,00
2.2.3.25.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	1.300.000.000,00
2.2.3.25.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PROCESING	1.125.000.000,00
2.2.3.25.07.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PASCA PANEN	2.104.260.000,00
2.2.3.26.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/ALAT PENYIMPAN	1.298.810.752,00
2.2.3.26.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN	18.810.752,00
2.2.3.26.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PENYIMPANAN	78.000.000,00
2.2.3.26.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT LABORATORIUM	1.202.000.000,00
2.2.3.27.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KANTOR	18.847.989.723,00
2.2.3.27.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN KETIK	23.000.000,00
2.2.3.27.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN MESIN HITUNG/JUMLAH	194.872.246,00
2.2.3.27.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT REPRODUKSI (PENGGANDA)	78.000.000,00
2.2.3.27.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PENYIMPANAN PERLENGKAPAN KANTOR	576.098.880,00
2.2.3.27.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	17.976.018.597,00
2.2.3.28.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT RUMAH TANGGA	61.591.301.142,00
2.2.3.28.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEUBELAIR	42.567.826.550,00
2.2.3.28.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PENGUKUR WAKTU	91.182.000,00
2.2.3.28.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PEMBERSIH	155.023.000,00
2.2.3.28.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PENDINGIN	6.623.696.320,00
2.2.3.28.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT DAPUR	396.625.000,00
2.2.3.28.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	11.068.648.272,00
2.2.3.28.07.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN	688.300.000,00
2.2.3.29.	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER	79.308.197.157,00
2.2.3.29.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER UNIT/JARINGAN	61.662.061.283,00
2.2.3.29.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN KOMPUTER MAINFRAME	1.329.050.000,00
2.2.3.29.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN MINI KOMPUTER	1.080.163.000,00
2.2.3.29.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	3.528.928.549,00
2.2.3.29.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN JARINGAN	1.835.119.425,00
2.2.3.29.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN PRINTER	3.258.131.737,00
2.2.3.29.07.	BELANJA MODAL PENGADAAN SCANNER	387.359.200,00
2.2.3.29.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN UPS/STABILIZER	2.308.863.963,00
2.2.3.29.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN SOFTWARE/PROGRAM	3.918.520.000,00
2.2.3.30.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	4.611.905.736,00
2.2.3.30.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA KERJA PEJABAT	1.165.600.000,00
2.2.3.30.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN MEJA RAPAT PEJABAT	440.850.000,00
2.2.3.30.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI KERJA PEJABAT	1.422.290.736,00
2.2.3.30.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI RAPAT PEJABAT	413.425.000,00
2.2.3.30.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT	5.040.000,00
2.2.3.30.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT	230.640.000,00
2.2.3.30.07.	BELANJA MODAL PENGADAAN LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	934.060.000,00
2.2.3.31.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT STUDIO	8.037.567.408,00
2.2.3.31.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN STUDIO VISUAL	6.917.782.408,00
2.2.3.31.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	304.200.000,00
2.2.3.31.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN CETAK	162.725.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.2.3.31.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN PEMETAAN UKUR	652.860.000,00
2.2.3.32.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KOMUNIKASI	2.134.717.620,00
2.2.3.32.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	173.250.000,00
2.2.3.32.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB	450.000.000,00
2.2.3.32.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KOMUNIKASI RADIO HF/FM	49.092.620,00
2.2.3.32.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KOMUNIKASI RADIO VHF	75.000.000,00
2.2.3.32.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KOMUNIKASI RADIO UHF	200.000.000,00
2.2.3.32.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	1.187.375.000,00
2.2.3.34.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN	64.043.521.392,00
2.2.3.34.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN UMUM	6.787.359.850,00
2.2.3.34.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN GIGI	882.676.020,00
2.2.3.34.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN KELUARGA BERENCANA	100.231.000,00
2.2.3.34.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN MATA	826.862.000,00
2.2.3.34.07.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT FARMASI	377.700.000,00
2.2.3.34.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN BEDAH	7.266.446.380,00
2.2.3.34.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KESEHATAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN	398.329.000,00
2.2.3.34.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT DALAM	310.876.812,00
2.2.3.34.12.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KESEHATAN ANAK	4.356.463.000,00
2.2.3.34.16.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN JANTUNG	7.197.028.000,00
2.2.3.34.18.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN RADIOLOGI	32.782.064.820,00
2.2.3.34.19.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN KULIT DAN KELAMIN	1.141.400.000,00
2.2.3.34.20.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT	1.616.084.510,00
2.2.3.36.	BELANJA MODAL PENGADAAN UNIT-UNIT LABORATORIUM	11.057.120.943,00
2.2.3.36.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT LABORATORIUM KIMIA AIR	120.000.000,00
2.2.3.36.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT LABORATORIUM BUATAN/GEOLOGI	489.500.168,00
2.2.3.36.12.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT LABORATORIUM UMUM	1.919.077.500,00
2.2.3.36.14.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT LABORATORIUM KEDOKTERAN	119.769.000,00
2.2.3.36.15.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI	319.200.000,00
2.2.3.36.16.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT LABORATORIUM KIMIA	1.241.219.115,00
2.2.3.36.18.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT LABORATORIUM PATOLOGI	2.000.000.000,00
2.2.3.36.23.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT LABORATORIUM STANDARISASI, KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	251.255.160,00
2.2.3.36.24.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT LABORATORIUM FARMASI	377.100.000,00
2.2.3.36.64.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT LABORATORIUM LAINNYA	4.220.000.000,00
2.2.3.37.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PERAGA/PRAKTEK SEKOLAH	64.812.650.175,00
2.2.3.37.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PERAGA/PRAKTEK SEKOLAH BIDANG PENDIDIKAN/KETERAMPILAN LAIN-LAIN	64.812.650.175,00
2.2.3.39.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR / ELEKTRONIKA	2.000.000,00
2.2.3.39.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN RECORDER DISPLAY	2.000.000,00
2.2.3.40.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PROTEKSI RADIASI / PROTEKSI LINGKUNGAN	198.375.000,00
2.2.3.40.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN PROTEKSI LINGKUNGAN	198.375.000,00
2.2.3.42.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	158.310.000,00
2.2.3.42.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT LABORATORIUM KUALITAS AIR DAN TANAH	700.000,00
2.2.3.42.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN	157.610.000,00
2.2.3.43.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM HIDRODINAMIKA	9.000.000,00
2.2.3.43.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN UMUM	4.000.000,00
2.2.3.43.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN PEMESINAN : MECHANICAL WORKSHOP	5.000.000,00
2.2.3.45.	BELANJA MODAL PENGADAAN PERSENJATAAN NON SENJATA API	82.500.000,00
2.2.3.45.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KEAMANAN	82.500.000,00
2.2.3.48.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN	53.000.000,00
2.2.3.48.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT BANTU KEAMANAN	41.000.000,00
2.2.3.48.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT PERLINDUNGAN	12.000.000,00
2.2.3.49.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	809.813.094.797,00
2.2.3.49.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR	260.745.915.897,00
2.2.3.49.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GUDANG	11.483.540.000,00
2.2.3.49.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GUDANG UNTUK BENGKEL	2.385.019.998,00
2.2.3.49.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM	44.769.497.346,00
2.2.3.49.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN KESEHATAN	59.895.425.120,00
2.2.3.49.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	12.219.546.710,00
2.2.3.49.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN	4.804.961.729,00
2.2.3.49.10.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	149.001.781.481,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.2.3.49.11.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA	31.821.460.000,00
2.2.3.49.12.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	2.034.650.000,00
2.2.3.49.13.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	172.550.000,00
2.2.3.49.14.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL	107.000.000,00
2.2.3.49.16.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG PABRIK	3.500.000.000,00
2.2.3.49.17.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN STASIUN BUS	15.000.000.000,00
2.2.3.49.18.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN KANDANG HEWAN/TERNAK	8.375.030.859,00
2.2.3.49.21.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG TERMINAL/PELABUHAN/BANDAR	153.068.549.107,00
2.2.3.49.27.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	50.428.166.550,00
2.2.3.50.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	61.862.166.965,00
2.2.3.50.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I	817.500.000,00
2.2.3.50.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN RUMAH NEGARA GOLONGAN II	1.012.700.000,00
2.2.3.50.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN	12.027.470.000,00
2.2.3.50.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN ASRAMA	35.177.266.250,00
2.2.3.50.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN RUMAH TRANSMIGRASI	12.827.230.715,00
2.2.3.51.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN MENARA	180.000.000,00
2.2.3.51.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI	180.000.000,00
2.2.3.52.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN BERSEJARAH	147.600.000,00
2.2.3.52.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN RUMAH ADAT	147.600.000,00
2.2.3.55.	BELANJA MODAL PENGADAAN MONUMEN/BANGUNAN BERSEJARAH	615.000.000,00
2.2.3.55.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN BERSEJARAH LAINNYA	615.000.000,00
2.2.3.57.	BELANJA MODAL PENGADAAN TUGU TITIK KONTROL/PASTI	380.800.000,00
2.2.3.57.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN TUGU/TANDA BATAS	380.800.000,00
2.2.3.58.	BELANJA MODAL PENGADAAN RAMBU-RAMBU	15.500.293.617,00
2.2.3.58.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN RAMBU BERSUAR LALU LINTAS DARAT	3.795.000.000,00
2.2.3.58.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN RAMBU TIDAK BERSUAR	10.029.693.617,00
2.2.3.58.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN RAMBU INFORMASI/BILLBOARD	1.675.600.000,00
2.2.3.59.	BELANJA MODAL PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	300.000.000,00
2.2.3.59.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN APPROACH LIGHT	300.000.000,00
2.2.3.60.	BELANJA MODAL PENGADAAN JALAN	424.317.482.896,00
2.2.3.60.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN JALAN PROPINSI	407.146.550.000,00
2.2.3.60.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN JALAN KHUSUS	17.170.932.896,00
2.2.3.61.	BELANJA MODAL PENGADAAN JEMBATAN	181.174.500.000,00
2.2.3.61.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN JEMBATAN KHUSUS	550.000.000,00
2.2.3.61.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN JEMBATAN PENYEBERANGAN	180.624.500.000,00
2.2.3.62.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN AIR IRIGASI	160.599.568.730,00
2.2.3.62.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN WADUK	52.287.500.000,00
2.2.3.62.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN PENGAMBILAN IRIGASI	25.775.000.000,00
2.2.3.62.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI	82.537.068.730,00
2.2.3.65.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	161.984.638.956,00
2.2.3.65.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN PENGAMAN PENGAMANAN SUNGAI	159.741.319.475,00
2.2.3.65.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN PELENGKAP PENGAMANAN SUNGAI	2.243.319.481,00
2.2.3.66.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	219.500.000,00
2.2.3.66.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN SUMBER AIR	219.500.000,00
2.2.3.67.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN AIR BERSIH/BAKU	4.503.450.000,00
2.2.3.67.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN PELENGKAP AIR BERSIH/AIR BAKU	4.503.450.000,00
2.2.3.68.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN AIR KOTOR	3.000.000,00
2.2.3.68.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN PEMBUANGAN AIR KOTOR	3.000.000,00
2.2.3.69.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN AIR	120.575.350.000,00
2.2.3.69.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN AIR LAUT	117.550.000.000,00
2.2.3.69.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN BANGUNAN AIR TAWAR	3.025.350.000,00
2.2.3.70.	BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI AIR MINUM BERSIH	27.298.180.000,00
2.2.3.70.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN AIR TANAH DALAM	22.612.180.000,00
2.2.3.70.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN AIR BERSIH/AIR BAKU LAINNYA	4.686.000.000,00
2.2.3.71.	BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI AIR KOTOR	5.357.000.000,00
2.2.3.71.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI AIR KOTOR	5.357.000.000,00
2.2.3.74.	BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	24.630.592.000,00
2.2.3.74.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL	1.175.000.000,00
2.2.3.74.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN PEMBANGKIT LIATRIK TENAGA MIKRO (HIDRO)	100.000.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.2.3.74.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA TENAGA SURYA (PLTS)	23.355.592.000,00
2.2.3.75.	BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI GARDU LISTRIK	100.000.000,00
2.2.3.75.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI GARDU LISTRIK DISTRIBUSI	100.000.000,00
2.2.3.77.	BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI GAS	854.997.000,00
2.2.3.77.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN INSTALASI JARINGAN PIPA GAS	854.997.000,00
2.2.3.79.	BELANJA MODAL PENGADAAN JARINGAN AIR MINUM	171.640.000,00
2.2.3.79.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN JARINGAN INDUK DISTRIBUSI	112.000.000,00
2.2.3.79.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN JARINGAN SAMBUNGAN KERUMAH	59.640.000,00
2.2.3.80.	BELANJA MODAL PENGADAAN JARINGAN LISTRIK	23.010.820.000,00
2.2.3.80.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN JARINGAN DISTRIBUSI	23.010.820.000,00
2.2.3.83.	BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU	7.779.056.300,00
2.2.3.83.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN UMUM	6.001.056.300,00
2.2.3.83.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN FILSAFAT	200.000.000,00
2.2.3.83.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN AGAMA	150.000.000,00
2.2.3.83.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN ILMU SOSIAL	212.000.000,00
2.2.3.83.05.	BELANJA MODAL PENGADAAN ILMU BAHASA	200.000.000,00
2.2.3.83.06.	BELANJA MODAL PENGADAAN MATEMATIKA & PENGETAHUAN ALAM	200.000.000,00
2.2.3.83.07.	BELANJA MODAL PENGADAAN ILMU PENGETAHUAN PRAKTIS	336.000.000,00
2.2.3.83.08.	BELANJA MODAL PENGADAAN ARSITEKTUR, KESENIAN, OLAH RAGA	200.000.000,00
2.2.3.83.09.	BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU GEOGRAFI, BIOGRAFI, SEJARAH	280.000.000,00
2.2.3.84.	BELANJA MODAL PENGADAAN TERBITAN	2.000.000,00
2.2.3.84.02.	BELANJA MODAL PENGADAAN BUKU LAPORAN	2.000.000,00
2.2.3.85.	BELANJA MODAL PENGADAAN BARANG-BARANG PERPUSTAKAAN	25.000.000,00
2.2.3.85.07.	BELANJA MODAL PENGADAAN REKAMAN SUARA	25.000.000,00
2.2.3.86.	BELANJA MODAL PENGADAAN BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN	5.406.600.000,00
2.2.3.86.03.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT KESENIAN	3.038.000.000,00
2.2.3.86.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT OLAH RAGA	1.875.900.000,00
2.2.3.86.07.	BELANJA MODAL PENGADAAN BENDA-BENDA BERSEJARAH	492.700.000,00
2.2.3.87.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT OLAH RAGA LAINNYA	101.472.000,00
2.2.3.87.04.	BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT OLAH RAGA LAINNYA	101.472.000,00
2.2.3.89.	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAMAN	33.400.000,00
2.2.3.89.01.	BELANJA MODAL PENGADAAN TANAMAN PERKEBUNAN	33.400.000,00
2.2.3.99.	BELANJA MODAL BLUD	13.407.865.791,00
2.2.3.99.01.	BELANJA MODAL BLUD.	13.407.865.791,00
	JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)	14.733.699.981.655,00 (441.760.665.792,00)
3.	PEMBIAYAAN	441.760.665.792,00
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	441.760.665.792,00
3.1.1.	PENGGUNAAN SILPA	441.760.665.792,00
3.1.1.01.	PENGGUNAAN SILPA TAHUN SEBELUMNYA	441.760.665.792,00
3.1.1.01.01.	PENGGUNAAN SILPA TAHUN SEBELUMNYA	441.760.665.792,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	441.760.665.792,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0
	PEMBIAYAAN NETO	441.760.665.792,00
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0